

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh pemerintah daerah di bawahnya, dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, untuk memperjelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya kewenangan untuk pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada pada Pemerintah Daerah. Baik atau buruknya kualitas laporan keuangan OPD mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bukan hanya alat pertanggungjawaban keuangan negara oleh pemerintah kepada rakyatnya saja, tetapi juga merupakan indikator dari kredibilitas pemerintah itu sendiri.

Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh rakyat haruslah memenuhi karakteristik yang diinginkan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Relevan antara lain: memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap. Andal antara lain penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Dapat dibandingkan yaitu laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Berdasarkan Mahmudi dalam Fitria, dkk (2022) Laporan Keuangan berupa informasi yang diperlihatkan guna membantu para pejabat publik terhadap pembuatan keputusan sosial politik dan ekonomi yang kemudian menghasilkan suatu keputusan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

dapat tercermin dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kualitas laporan keuangan pemerintah pusat yang lebih baik ditandai dengan berubahnya opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP misal, dari opini tidak memberikan pendapat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau dari WDP menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satu cara untuk mewujudkan opini WTP adalah dengan penatausahaan barang milik negara (BMN) dengan benar.

Berdasarkan peraturan pemerintah 28 tahun 2020 penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya yaitu penyusunan neraca pemerintah daerah, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administratif terhadap barang milik daerah. Penatausahaan barang milik daerah (BMD) tentu saja menjadi hal yang amat krusial, karena lewat penatausahaan akan menghasilkan informasi yang tepat bila dikelola dengan baik (Fitria, dkk 2022). Penatausahaan yang baik akan memperoleh informasi yang lengkap, jelas dan akurat mengenai aset, maka memudahkan pemerintah daerah untuk menggunakan dan memanfaatkan aset tersebut. Dalam pengelolaannya barang milik daerah mempunyai fungsi penting dalam pelaksanaan pemerintahan, tetapi proses pengelolaan barang milik daerah bukan perkara yang mudah, pemerintah dalam mengelola barang milik daerah sering kali menghadapi berbagai kendala di dalam pengelolaannya.

Permendagri No. 11 Tahun 2018 kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan berdaya guna. Sumber daya manusia (SDM) harus memiliki kompetensi dibidang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan agar laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik (Zubaidi, 2019). SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi

pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan sangat dibutuhkan. Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka.

Sistem pengendalian internal juga memiliki peranan penting dalam menjamin kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan. Kehadiran sistem pengendalian internal dapat menjadi penjamin keyakinan yang memadai atas informasi dari laporan keuangan yang disajikan. Selain itu, dengan adanya sistem pengendalian internal dapat meningkatkan pengawasan (Wiguno, 2022). Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, sebuah organisasi pengendalian internal merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan operasional serta kinerja dari sebuah organisasi membutuhkan suatu aturan yang di khususkan untuk memberikan batasan pada setiap kegiatannya.

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya mendapatkan penilai yang berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan berpengaruh pada kredibilitas pemerintahan tersebut.

Dalam Penelitian ini kualitas laporan keuangan ditinjau dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Periode 2017 s/d 2021. Mendapati bahwa BPK menyatakan Laporan Keuangan Kabupaten Musi Rawas mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut untuk tahun 2017 s/d 2021. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa laporan keuangan

Kabupaten Musi Rawas masih terdapat beberapa temuan. Tabel 1.1 merupakan jumlah temuan audit, rekomendasi dan pemantauan atas tindak lanjut Kabupaten Musi Rawas dari temuan.

Tabel 1. 1
Pemantauan Atas Tindak Lanjut Kabupaten Musi Rawas

Priode	Temuan	Rekomen dasi	Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai Dengan Rekomend asi	Belum Sesuai Dengan Rekomend asi	Belum Ditinda klanjuti	Tidak Dapat Ditindakla njudi Dengan Alasan Yang Sah
2017	14	40	40	0	0	0
2018	28	80	78	2	0	0
2019	29	76	75	1	0	0
2020	17	39	35	4	0	0
2021	31	85	45	40	0	0
Total	119	320	273	47	0	0

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2022 (diolah, 2023)

Dari tabel tersebut Berdasarkan Data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, nilai temuan terbanyak yakni terdapat pada tahun 2021 sebesar 31 temuan . Data tersebut berarti bahwa walaupun opini akhir BPK untuk laporan Keuangan Pememerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas mendapatkan WTP namun masih banyak koreksi yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas khususnya pada penatausahaan barang milik daerah, pengendalian internal, dan sumber daya manusianya.

Temuan BPK yang tercantum pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2021 menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal maupun pengelolaan barang milik daerah yang masih belum memadai kasusnya antara lain perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis anggota DPRD, serta belanja perjalanan dinas pendukung kegiatan tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar 1,2 Milyar Rupiah, Penatausahaan Persediaan pada

Empat OPD Belum Memadai dan Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tidak Tertib.

Beberapa studi terdahulu tentang hubungan Penatausahaan Barang Milik Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah masih adanya perbedaan hasil penelitian. Fitria, dkk (2022) dalam hasil penelitiannya menyatakan penatausahaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan hasil Amaliah, dkk (2019) menyatakan penatausahaan barang milik negara tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Zubaidi (2019) dalam hasil penelitian menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berbeda dengan hasil penelitian Animah, dkk (2020) menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Wiguno (2022) dalam hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Mokoginta, dkk (2017) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan tidak konsistennan hasil penelitian terdahulu dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penatausahaan barang milik daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas?

2. Apakah penatausahaan barang milik daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
2. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Musi Rawas, dengan unit pengamatan 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari seluruh Badan, Dinas, Sekretariat dan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.

1.4 Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas?

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan penatausahaan aset tetap dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas?

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga bermanfaat bagi beberapa pihak.

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran atau acuan penelitian bagi penulis selanjutnya, khususnya mahasiswa program studi Akutansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel terbaru lainnya.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, konsep dan pemikiran baru mengenai ilmu Ekonomi khususnya Akuntansi Sektor Publik. Serta sebagai referensi bagi pihak lain jika ingin memperluas kajian mengenai ilmu akuntansi sektor publik.